

ACEH DAN PERDAMAIAN

Ikbal Husni, Raqsan Jani, & Muthakin

Abstrak

Aceh is one of the provinces in Indonesia. In the history of independence, Aceh has had considerable services, so the first president of the Republic of Indonesia dubbed Aceh as the capital of Indonesia. Although half of the story of Aceh's journey is a story about war and conflict, on the sidelines of the conflict there are a number of stories about the peace that was sought by both parties, such as the lamteh pledge, the humanitarian break, the Tokyo agreement, and some of these peace endings with a violation of the agreement between the parties. both, so that the tsunami hit the plains of the Veranda of Mecca on December 26, 2004, which opened the eyes and the way for jointly seeking a ceasefire and the last one with a mutual agreement, namely the MOU of Helsingki which was mutually agreed on August 15, 2005. This has become a big bridge for the people of Aceh to achieve lasting peace.

Keywords: *Aceh, Conflict, and Peace*

1. PENDAHULUAN

Aceh merupakan suatu wilayah yang sangat luas dan merupakan satu-satunya wilayah yang tidak dapat ditaklukkan oleh pihak Belanda, secara keseluruhan Aceh yang sudah sangat berjasa bagi masyarakat Indonesia, jasa yang sangat besar ditorehkan oleh Aceh untuk Indonesia dalam membangun secara bersama-sama melawan penjajahan. Jika dihitung perang Aceh merupakan perang paling lama yang tercatat sejarah, yaitu dimulai dari tahun 1873 sampai tahun 1904, belum lagi ditambah dengan perseteruan saudara antara Aceh dan pemerintahan Indonesia, yaitu perang DI/TII Aceh yang dimulai dari tahun 1953-1962 yang di pelopori oleh Teungku Daod Beureueh, yang akhirnya damai dengan setelah Teungku Daod Beureueh turun gunung. Lalu perlawanan selanjutnya yang dipelopori oleh Teungku Muhammad Hasan Ditiro, yang pada akhirnya berakhir dengan kesepakatan damai bersama antara keduanya di Helsingki pada tanggal 15 agustus 2005. Dari penjabaran di atas kita telah melihat awal-awalnya konflik yang berakhir damai di antara keduanya sehingga segala upaya keduanya dilakukan untuk meredam konflik dengan damai walau memakan waktu yang relative lama kedua belah pihak berhasil untuk damai. Akhirnya penulis mengambil sebuah judul "*Aceh dan Perdamaian*", karena melihat begitu banyaknya perjuangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang awalnya tidak mau berdamai akhirnya mengambil kebijakan dengan menurunkan egonya berhasil mencapai kesepatan bersama, dan yang paling penting adalah tulisan ini menjadi sebuah terobosan bagi bajian resolusi konflik.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam makalah ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah merupakan penelahan dokumen-dokumen yang ada serta sumber-sumber lainnya yang dilakukan secara sistematis dengan cara memaparkan permasalahan dan pemecahan masalah: penelitian dengan cara mengumpulkan, menyusun dan mengklarifikasi data yang ada hubungannya dengan Aceh dan perdamaian. Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan, maka dalam penelitian ini menggunakan studi Pustaka, Studi pustaka dilakukan untuk memperbanyak data secara akurat. Oleh karena ini penelitian yang menggunakan metode penelitian sejarah, dalam pelaksanaannya dilakukan melalui tahapan heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.



3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Aceh dan Perdamaian

Struktur masyarakat Aceh yang luas dan beragam telah membuat corak kebudayaan yang ada di daerah Aceh yang sangat khas dan beraneka rupa sehingga dengan bercampurnya banyak ragam etnis yang datang ke Aceh, seperti adanya simata biru (keturunan Portugis/ bule), keturunan Cina, keturunan Hindia, bahkan keturunan Turki dan Arab sekalipun ada di Aceh sehingga munculnya kekhasan tersendiri bagi struktur masyarakat yang homogen. Sebagai suku bangsa Indonesia yang memiliki sejarah yang panjang, dan berdaulat pada masanya, sekarang Aceh menjadi bagian dari Indonesia, secara geografisnya Aceh terletak pada 01 58' 37, 2" - 06 04' 33, 6" Lintang Utara dan 94 57' 57, 6" - 98 17' 13,2" Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 Meter dari permukaan laut.[1] Secara sosiologis, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang paling banyak mendiami wilayah Aceh—suku Aceh, yang mendiami wilayah pesisir Pantai Timur, seperti Aceh Besar sampai Tamiang, sedangkan Pantai Barat Selatan didiami oleh banyak suku lainnya yaitu, Aneuk Jamei, Haloban, Alas, Batak Pak-Pak, Singkil, dan lain-lainnya menurut catatan sipil pada tahun 2015 tercatat prosentase persebaran Agama adalah Islam sebanyak 98,5%, Katolik 1,3%, Hindu 0,1% dan Budha 0,0% dan Protestan sebanyak 0,2%.

Kebudayaan masyarakat Aceh yang berakar sejak dahulu dengan Islam sehingga kondisi ini timbul dimana kebudayaan Aceh terintergrasi di antara agama dan budaya Islam secara solid sehingga terefleksi dalam sebuah hadis maja Aceh, "*hukom ngen adat lagei zat gen sifeut*" yang bermakna hukum (ajaran agama) menyatu dengan adat (budaya) seperti menyatunya zat Tuhan dengan sifat. Menjelang akhir abad ke-17, arus perjajahan Bangsa Barat menginfansi ke timur dengan cepat. Bangsa Eropa berlomba-lomba ke dunia timur untuk menemukan tempat-tempat baru yang bisa dieksploitasi. Di antara bangsa Eropa yang awal mula sekali berhasil merebut tanah jajahan di Goa adalah Portugis. Selanjutnya mereka melakukan ekspansi ke Selat Malaka dan di semenanjung Selat Malaka sudah berdiri kerajaan Islam seperti Aru, Tamieng, Pasee, Perlak, Pedir dan Daya. Dengan mengedepankan agama islam yang menjadi *way of life*, masyarakat Aceh telah membuktikan keselarasan antara hidup bermasyarakat sekaligus hidup menjadi pemimpin yang layak diajungi jempol sehingga telah melahirkan raja-raja, ulama-ulama yang bijaksana dan arif dipandang di mata dunia.

Tentu di saat kita berbicara tentang perdamaian selalu dibarengi dengan konflik, yang merupakan gerak sosial yang ada di dalam masyarakat, sehingga berbicara tentang perdamaian selalu akan tentang konflik. Dalam KBBI, perdamaian adalah penghentian permusuhan (perselisihan dan sebagainya) sedangkan konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan, sedangkan konflik sendiri di bagi menjadi 2 yaitu konflik vertikal dan konflik horizontal melihat konflik Aceh tentu ke dua konflik tersebut ada yang di awali dengan konflik vertikal antara pemerintah daerah dengan pusat dibarengi dengan konflik horizontal yaitu konflik antara masyarakat pendatang dengan masyarakat sekitar dan tentu wilayah Aceh menjadi salah satu daerah yang mengalami konflik yang sangat Panjang sehingga bila kita bercerita tentang Aceh akan terlintas dipikiran kita adalah konflik yang berkepanjangan. Menjelang abad 17 masehi, sudah banyak bangsa Eropa menjelajah untuk mencari benua-benua baru walaupun kenyataannya sebelum bangsa Eropa masyarakat islam sudah lebih dahulu menemukan benua-benua baru, berbeda visi dan misi di antara kedua penjelajah tersebut sangatlah nampak, dikarenakan penjelajah Eropa bukannya untuk berdagang mereka juga memonopoli, menyebarkan, menjajah penduduk setempat dan mengeksploitasi hasil bumi dimana tempat mereka

mengklonialisasi. Semangat-semangat dalam mengusir penjajah di bumi serambi mekkah sudah ditanamkan sejak sedari kecil bukan hanya isapan jempol semata, senadung-senadung pengantar tidur (*Dodaidi*) yang sangat epic selalu diperdengarkan, sehingga masyarakat Aceh secara psikologisnya memang dididik untuk melawan penjajahan yang ada di Aceh. Senadung ataupun hikayat-hikayat yang ditulis oleh para ulama-ulama Aceh. Potongan liriknya sebagai berikut: "*Alah hai do kudoda idi merah pati kapatah tuot, alah hai do ku doda idang, silanyang blang kaputoh taloe, beu rijang rayek hai banta sedang tajak bantu prang tabela nanggroe*". [2] Senadung ini merupakan harapan seorang ibu kepada anaknya untuk supaya cepat besar dan memperjuangkan kedaulatan rakyat Aceh dan ikut memegang senjata untuk berperang melawan penjajahan kolonialisme.[3]

Peperangan dengan kolonialisme di Aceh yang dimulai sejak tahun 1873 sampai tahun 1941 banyak menimbulkan korban jiwa, baik dari pihak Belanda sendiri yang tewas mencapai 37.500 orang dan pihak Aceh mencapai 70.000 orang. Jadi secul tanah Aceh yang diambil paksa oleh pihak penjajahan Hindia Belanda dipertaruhkan dengan darah dan nyawa masyarakat Aceh. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 dengan segala perjuangannya, kedamaian yang dicapai hanya sementara, karena walaupun secara umum Indonesia dipandang sudah merdeka namun di dalam tubuh pemerintahan Indonesia masih banyak gejolak-gejolak yang ingin memisahkan diri dari tubuh Indonesia, misalnya ada pemberontakan PKI di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Muso. Diawali dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, karena tidak lagi mendapat dukungan setelah kesepakatan Perjanjian Renville. Dalam perjanjian tersebut Belanda dianggap pihak yang paling diuntungkan dan Indonesia telah dirugikan. Dengan kemunduran Amir ini, Presiden Soekarno kemudian menunjuk Mohammad Hatta sebagai perdana menteri dan membentuk kabinet baru. Namun, Amir beserta kelompok sayap kirinya (komunis) tidak setuju dengan pergantian kabinet tersebut, sehingga Amir dan komplotannya berusaha menggulingkan pemerintahan yang sah.[4]

Setelah semua dihentikan bukan berarti pemberontakan model lain tidak bermunculan contohnya pemberontakan DI/TII yang dipelopori Kartoswirjo yang dilandasi atas ketidakpuasan Kartoswirjo terhadap kemerdekaan Indonesia yang saat itu masih dibayang-bayangi Belanda yang masih ingin berkuasa di Indonesia. Pada awal tahun 1948 adanya pertemuan antara S.M. Kartosuwirjo dengan panglima besar Sabilillah dan Raden Oni Syahoni. Pertemuan ini terjadi karena mereka bertiga menentang adanya perjanjian Renville. Kartosoewirjo lantas mengubah penolakannya dengan membentuk negara Islam yaitu Negara Islam Indonesia (NII) yang dipimpin oleh dirinya sendiri. Dicususnya NII ini menjadi bentuk protes dari Kartosoewirjo kepada Belanda sekaligus untuk Indonesia yang mereka anggap terlalu lemah pengaruh dari Kartosoewirjo pun semakin membesar setelah ia mendirikan angkatan bersenjata untuk NII yang bernama Tentara Islam Indonesia (TII). Tujuan dari dibentuknya TII sendiri adalah untuk memerangi pasukan TNI agar bisa memisahkan diri dari negara Indonesia. Pergerakan NII pun semakin berkembang berkat dukungan dari daerah-daerah lain yang juga merasa kecewa terhadap Indonesia.[5]

Dengan melebarnya pemberontakan di wilayah-wilayah Indonesia termasuk wilayah Aceh di dalamnya yang dipimpin oleh Teungku Daot Beureueh, kerana merasa tidak diperhatikan oleh pusat baik dalam hal-hal yang berkaitan janji antara aceh dan pusat dalam masalah pemberlakuan hukum syariat islam, ekonomi dan masalah Pendidikan, dalam pandangan *Teungku* Daud Beureueh bahwa Jakarta hanya sibuk bertingklai dalam politik parlementer pada saat itu. Dan yang terpenting untuk Aceh menurut *Teungku* Daud Beureueh adalah status otonomi khusus yang memungkinkan untuk Aceh memiliki sistem pemerintahan sendiri yang berasaskan Islam yang tak kunjung diberikan oleh Presiden Soekarno.[6]



Bentuk dari ketidakpuasan politik Teungku Daud Beureueh yang mulai terungkap sejak tahun 1950, yang berkenaan dengan otonomi Aceh, beliau memberontak terhadap pemerintah dari Acting Gubernur di Medan dengan resiko kefakuman pemerintahan di Aceh. Sejarah telah mencatat bagaimana gairah dan semangat masyarakat Aceh dalam menyambut kemerdekaan Republik Indonesia, sehingga Presiden Soekarno menyebutkan wilayah Aceh sebagai "Daerah Modal Indonesia" pada tahun 1948. Namun lima tahun kemudian, muncullah kekecewaan terhadap pemerintahan pusat yang tidak tanggap dalam menghadapi aspirasi/permintaan dari daerah, pemberontakanpun meletus sejak tahun 1952 hingga sampai 1962, serta ditambah lagi dengan pemberontakan GAM. Yang akhirnya pemberontakan ini dibagi menjadi 3 fase penting yaitu fase pertama di antara tahun 1975-1988, fase kedua 1989-1998 dan fase ketiga tahun 1990-2005. Tidak banyak yang mengetahui bahwa Darul Islam di Aceh adalah bagian dari gerakan Darul Islam yang diproklamasikan oleh Sekarmaji Maridjan Kartosoewirjo di Jawa Barat.

Bahkan Dunia Barat, melalui media dan persnya, menilai sejumlah pemberontakan yang berada di bawah bendera Darul Islam di awal kemerdekaan yang dialami Indonesia dari tahun 1949 hingga 1953 sebagai "*the unknown war*" (perang yang tak diketahui). Dalam pandangan masyarakat Barat, populasi Islam di Indonesia yang berjumlah 68 juta jiwa ketika itu adalah populasi muslim terbanyak di dunia yang terdiri dari kaum petani, subsisten yang lemah yang hanya berpuas diri dengan memanen setangkup getah karet, si-gunca padi, seikat tebu, sekarung teh dan sekaleng kopi. Selain itu, yang diketahui oleh umum adalah bahwa Indonesia menyimpan bara api berbahaya disatu sudut kehidupan yang sama berbahayanya dengan gugusan gunung berapi di setiap pulaunya. Islam telah memberikan kekuatan dan spirit untuk menghadapi Kolonialisme Belanda dan Pemerintahan Republik Jepang. Bagi barat yang awam, Darul Islam adalah "*a fanatic guerrilla Organization*" (organisasi geliria fanatic) yang mengganggu Republik Indonesia yang baru berdiri dengan kekacauan dan perang sipil. Dengan berjalannya waktu pihak pemerintahan Indonesia terus melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh DI/TII di Aceh, misalnya Hardi yang bertemu dengan dewan revolusi Aceh yang telah membuahkan butir-butir hasil pemikiran seperti berikut:

1. Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia tanggal 26 Mei 1959 No. I/Misi/1959 yang pokoknya menyatakan bahwa Daerah Swatantra Tingkat I Aceh dapat disebut "Daerah Istimewa Aceh" dengan catatan bahwa kepada daerah itu tetap berlaku ketentuan-ketentuan mengenai Daerah Swatantra Tingkat I seperti termuat dalam Undang-Undang tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah begitu pula lain-lain peraturan perundangan yang berlaku untuk Daerah Swatantra Tingkat I mengenai otonomi yang seluas luasnya terutama dalam keagamaan, peradatan, dan pendidikan.
2. Segala aparat dari NBA/NII (Militer/Polisi/Sipil) diterima kedalam pasukan yang bernama pasukan Teungku Chik di Tiro sebagai bagian dari Komando Daerah Militer Aceh/Iskandar Muda sesuai dengan pernyataan Misi Pemerintah Pusat yang bertanggal Kutaraja, 26 Mei 1959.
3. Pemerintah akan membantu sekuat tenaga dalam batas-batas kemampuan negara pembangunan semesta di Aceh, terutama dalam bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan rakyat, jasmani dan rohani; untuk langkah pertama untuk merealisasikan maksud Pemerintah tersebut Misi Pemerintah Pusat telah membawa otorisasi sejumlah 88,4 juta rupiah.

Dengan tercapainya persetujuan antara Dewan Revolusi dan Misi Hardi maka leburlah Negara Bagian Aceh dari Negara Islam Indonesia yang berada di bawah pimpinan Trio Hasan Saleh, Ayah Gani, dan Amir Husin Almujaahid. Sekaligus anak buahnya, baik sipil maupun militer, yang berada di daerah-daerah yang dikuasai oleh Dewan Revolusi turun masuk ke dalam sebuah pasukan yang bernama Pasukan Teungku Chik di Tiro yang kemudian dipecahkan masuk kedalam kesatuan-kesatuan TNI. Namun Teungku Daod sendiri pada saat itu masih bergerilya melakukan perlawanan terhadap Indonesia, sebagai bentuk ketidakpuasan karena dibubarkannya Provinsi Aceh dan dimasukkan Provinsi Aceh ke dalam Provinsi Sumatera Utara oleh pemerintahan pusat, Aceh yang dulunya merupakan modal utama Indonesia dan yang telah menyumbang baik harta benda bahkan nyawa, dengan berat hati. Pada tanggal 21 September 1953 Teungku Daod Beureueh memproklamasikan Aceh sebagai negara Islam. Untuk menghindari konflik yang terbuka Teungku Daod Beureueh bersama resimennya memilih naik gunung dan bertahan sampai tahun 1962. Kekerasan hati Teungku Daod Beureueh yang selama ini dikenal sangat oleh masyarakat luas akhirnya bisa ditaklukkan oleh Kolonel Jasin. Dan hanya 2 orang yang hanya bisa membujuknya yang pertama dari kalangan DI/TII sendiri adalah Ayah Hamid dan dari pihak militer adalah Kolonel Jasin yang sudah berbalas surat-menyuratnya sejak tahun 1961 hingga pada Rabu 9 Mei 1962, Teungku Daod Beureueh akhirnya turun kembali.[7]

Guna melakukan pertemuan-pertemuan dengan para pemimpin pemberontakan di lapangan untuk melakukan perundingan, dan hasil dari beberapa pertemuan disepakatilah dalam sebuah perjanjian Ikrar Lamteh. Dengan hasil yaitu Menteri Ali memenuhi segala aspirasi rakyat Aceh dengan membentuk UU. No 24/1957 yang di dalam rangka pembentukan Provinsi Aceh mempunyai otonomi yang luas sesuai dengan UU. No 1/1957. Diangkatlah Aly Hasyimy sebagai gubernur/kepala daerah Provinsi Aceh yang dilantik pada tanggal 27 Januari 1957, selain itu juga berdasarkan masukan-masukan yang diberikan pada saat reuni para Perwira Ex Divisi Gajah I. Seperti yang diketahui bersama *Ikrar Lamteh* inilah yang menjadi titik penengah dan telah mampu untuk menyelesaikan sengketa berdarah yang telah lama terjadi di Aceh dan telah menciptakan suasana yang damai diantara kedua belah pihak yang telah bertikai, piagam atau *Ikrar Lamteh* adalah kesepakatan bersama suku Aceh yang sama sekali yang tidak bertentangan dengan Pancasila, dan merupakan suatu sampel dan terminal bus rakyat Aceh untuk menuju kebahagiaan dan puncak ketinggian.[8]

Setelah semua aman ternyata pada tahun 1976 terjadi lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Hasan Di Tiro, yang awal kemunculannya diberikan lebeling oleh pemerinthan adalah GPL (gerakann pengacau liar). Pada awalnya, GAM adalah sebuah organisasi yang diproklamasikan secara terbatas. Deklarasi GAM oleh Hasan Tiro dkk, dilakukan secara diam-diam di sebuah kamp kedua yang bertempat di Bukit gunung Halimon, Pedalaman Kecamatan Tiro, Pidie. Pada 4 Desember 1976 inisiator Gerakan Aceh Merdeka Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mengeluarkan pernyataan perlawanan terhadap pemerintah RI yang dilangsungkan di perbukitan Halimon di kawasan Kabupaten Pidie. Diawal masa berdirinya GAM nama resmi yang digunakan adalah AM, (Aceh Merdeka). Oleh pemerintah RI pada periode 1980-1990 nama gerakan tersebut dikatakan dengan GPK-AM (Gerakan Pengacau Keamanan-Aceh Merdeka). Pada awalnya, gerakan ini adalah gerakan sekelompok intelektual (bahkan dapat disebut sebagai gerakan berdimensi kekerabatan) yang kecewa atas model pembangunan di Aceh. Tentu pada awalnya Gerakan yang disebut dengan GPK ini mendapatkan perlawanan sangat keras pada masa orde baru. Pada masa ini segala kegiatan yang menyangkut dengan ke stabilan negara diambil alih oleh militer, sehingga banyak kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Seperti Penghilangan orang, pembunuhan,



pemeriksaan, penculikan, justru menjadi anti-tesis dari proses integrasi politik. Akibat penyelesaian yang tidak tuntas di masa lalu dan kegagalan pendekatan dalam menangani separatisme tersebut, sumber-sumber dan sebab-sebab separatisme di Aceh justru semakin subur, bahkan melahirkan generasi baru (generasi korban DOM yang kemudian mendukung GAM).

Dengan dibebaskannya media pres pada tahun 1998 dan dengan ditariknya militer di wilayah Aceh telah membuat suatu jalan upaya untuk membuka lembaran baru dalam upaya damai. Tercatat sudah beberapa kali damai upaya damai dilakukan oleh kedua belah pihak yang pertama sejak presiden Gus Dur menjabat menggantikan presiden B.J Habibi. Dengan tajuk Jeda Kemanusiaan 1 dan 2 walaupun tidak berlangsung lama karena ketidaksesuaian isi perjanjian dengan apa yang terjadi di lapangan, namun setidaknya hal ini sudah membawa dampak yang positif bagi masyarakat Aceh dan Indonesia dan membuka angin segar untuk ke depannya. Lalu perjanjian Tokyo yang gagal karena tidak ada kesepakatan bersama untuk menghentikan peperangan secara bermartabat telah membuat jalan damai yang pernah diusahakan kembali, karena pada saat itu GAM tidak mau menyerah secara mutlak. sehingga terjadinya gelombang Tsunami Aceh pada tahun 2004 telah membuka jalan kembali antara pemerintahan Indonesia dan GAM Kembali mau berdiskusi dan menyampingkan ego mereka masing-masing, dengan melihat Aceh yang telah di porak poranda oleh air bah yang maha dahsyat, menjadi teguran Tuhan kepada manusia untuk segera mengakhiri peperangan yang sudah berjalan selama 3 dekade lebih itu.

Pasca Tsunami di Aceh, baru disadari bahwa konflik dan kekerasan di Aceh harus dihentikan. Kesadaran inilah yang akhirnya mendorong hingga 5 kali pertemuan antara pihak pemerintah RI dan GAM di Helsinki, Finlandia. Hingga akhirnya perjanjian perdamaian ditanda tangani pada 15 Agustus 2005. Meskipun demikian, perdamaian Aceh tidaklah mudah dicapai. Beberapa kalangan pejabat pemerintah termasuk anggota DPR seakan "menentang" perdamaian ini. Sebelum nota kesepahaman damai ditandatangani, kalangan ini mengeluarkan sejumlah "manuver" kecurigaan dan keberatannya. Pada episode ini terlihat jelas bagaimana masih gencarnya pihak-pihak yang tidak menginginkan kedamaian ada di Aceh. Sejumlah kalangan yang menentang tersebut mengkhawatirkan nasib "Keutuhan NKRI." [9]

Perundingan yang dibantu oleh banyak pihak termasuk di dalamnya Martti Ahtisaari sebagai mantan Presiden Finlandia dan Direktur *Crisis Management Initiative* telah menghasilkan sebuah kesepakatan damai yang dikenal dengan nama *Memorandum of Understanding* (MoU). Perundingan ini bukan hanya menjadi angin segar kedamaian bagi rakyat Aceh, tetapi juga termaktub hak-hak rakyat Aceh yang harus dipenuhi oleh pemerintah pusat melalui Pemerintah Provinsi Aceh terkait dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Tentu saja CMI belajar dari perjanjian sebelumnya yang difasilitasi oleh HDC (*Henry Dunant Center*) pernah membentuk JSC (*Joint Security Committee*) terdiri dari unsur pemerintah RI, GAM, dan HDC, komite ini memiliki kekuatan untuk memaksa TNI dan GAM agar menghindari operasi militer yang akan menimbulkan korban jiwa. Ada beberapa pencapaian utama dari MoU Helsinki tersebut bagi rakyat Aceh, yaitu, penerapan syariat Islam dan Lembaga Wali Nanggroe, pembentukan partai politik lokal, dan pembagian hasil minyak bumi dan gas alam sebesar 70 persen, dan permasalahan penggunaan lambang, bendera serta himnanya. Sementara pihak GAM sendiri bersedia untuk menanggalkan tuntutan merdeka dan bersedia membangun Aceh ke arah yang lebih baik di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. [10]

Persamaan Aceh semestinya menjadi contoh bagi negara-negara yang lain karena semua konflik bisa diselesaikan dengan damai asalkan kedua belah pihak saling menepati janji yang sudah di sepakati. Melihat kasus Aceh memang sudah banyak yang ditepati, contohnya pembentukan Lembaga Wali Nanggro, pembentukan Parlok (partai lokal) yang awalnya sangat ditolak oleh pemerintah pusat, namun ada juga, janji-janji yang belum ditepati misalnya pengibaran bendera Aceh yang tertuang dalam MOU Helsinki poin 1.1.5 yang menyatakan Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang, dan himne. Menurut pengamatan penulis, apabila hal-hal krusial seperti ini belum diputuskan segera baik dan bijak oleh pemerintah pusat dan daerah, maka hal ini seperti bongkahan bola salju yang turun dari lereng gunung yang awalnya hanya masalah kecil namun karena sifat dan tempat yang mendukung menjadi longsoran salju yang menghantam pemukiman warga, dan hal ini sangat lah disayangkan di kemudian hari. Pemerintah harus memperhatikan betul perdamaian yang telah dicapai dengan pertumpahan darah dari warganya ini haruslah digaja dan menjadi abadi dan bisa dirasakan oleh semua kalangan baik itu keturunan GAM, TNI dan Polri, semua itu, bahkan Uni Eropa sangat mendukung kita semua menjaga perdamaian ini seperti kata kata Dubes Uni Eropa Vincent Piket di Banda Aceh, yang dikutip oleh republika, bahwa "Uni Eropa mendukung perdamaian Aceh dan progresnya sangat bagus dan berjalan baik." [11]

4. KESIMPULAN

Aceh sebagai provinsi yang memang harus menjadi acuan bagi Negara-negara yang berkonflik dan sudah seharusnya menjadi contoh yang baik, dan semestinya semua hasil kesepakatan yang pernah disepakati bersama haruslah segera direalisasikan semua baik secara cepat dan mau pun bertahap supaya kita menjadi pelajaran bagi semua pihak. Perdamaian ini sememestinya harus menjadi abadi dan bisa dirasakan oleh semua kalangan baik kombatan GAM, TNI polri dan pemerintah pusat, Aceh seharusnya segera membangun peradabannya yang harus diakui oleh semua kalangan, konflik yang berkepanjangan ini sudah merusak system tatanan sosial masyarakat Aceh keseluruhan baik di bidang agama, Pendidikan, dan system adat istiadatnya. Sehingga semua itu sangat lah harus cepat di selesaikan oleh pemerintah Aceh ke depannya. Konflik yang terjadi hanya meninggalkan luka, dendam, dan kemiskinan ini, akan bertambah parah bila pemerintah tidak hadir untuk menuntaskan semuanya, baik yang sudah pensiunan atau pun kalangan muda mempunyai tugas dan tanggung jawab bersama, yaitu menjaga perdamaian ini terus menjadi perdamaian yang abadi dan bisa dinikmati oleh semua kalangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Panitia *International Conference on Islamic Studies (ICIS)* Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan kesempatan dalam Presentasi Paper pada Forum Internasional.



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, *Pokok Pikiran Kebudayaan Aceh*, Banda Aceh: Humas Aceh, 2018, 1.
- [2] Mukhsin Rizal, *Inong Balee Dalam Gerakan Aceh Merdeka (1976 - 2005)*, Banda Aceh: 2007, 2.
- [3] Syarifudin Tippe, El-Hurr, *Nurani Untuk Aceh*, (Banda Aceh: Yayasan Ulul Alham, Ihacom, 2001, 9.
- [4] Kompas.com "Pemberontakan PKI Madiun 1948" ,<https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/26/170656879/pemberontakan-pki-madiun1948?Page=all>. Dikutip pada tanggal 14 september 2021
- [5] Kompas.com "Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat", Klik untuk baca: <https://www.kompas.com/stori/read/2021/04/10/101826479/pemberontakan-di-tii-di-jawa-barat?page=all>. Dikutip pada tanggal 14 september 2021
- [6] Komando Tentara Teteritorium 1 Bukit Barisan, Memoraterium Tentang Peristiwa Pemberontakan Di-TII di Aceh, Banda Aceh: Staf Umum I Tentara & Ter.I Bukit Barisan, 1999, 28-29.
- [7] Tempo Edisi Khusus "*Batu Cadas Dari Beureunuen*" 4 Agustus 2003
- [8] Letkol, (Pur) Hasan Saleh, *Menyingkap Tabir Pemberontakan Rakyat Aceh Tahun 1953*, Banda Aceh: Pusat Dokumentasi dan Informasi Aceh), 73.
- [9] Berita KontraS No. 04/VII-VIII/2005, hal.4.
- [10] Yuhdi Fahrimal, *Aceh Pasca-Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki: Meninjau Kembali Qanun Aceh dalam Perspektif Kebijakan Publik*, www.academia.edu, hal. 2.
- [11] Dikutip dari <https://www.republika.co.id/berita/q6oiqg320/dubes-uni-eropa-nilai-perdamaian-Aceh-berjalan-baik> pada tanggal 15 September 2021.